

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 11 jaminan sosial adalah “skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa tugas pemerintah mengusahakan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia secara merata tanpa terkecuali demi tercapainya kesejahteraan sosial seperti yang terdapat di dalam sila kelima.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah badan atau lembaga yang memfasilitasi jaminan sosial, khususnya penyedia akses kesehatan yang menjadi salah satu kajian penelitian terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat melalui lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta informasi tentang pelaksanaan jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan suatu badan usaha milik Negara yang di tugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh

Rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis kemerdekaan, beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kesehatan adalah keadaan seseorang yang secara fisik dan non fisik yang memungkinkan seseorang dapat hidup dengan baik secara perkembangan sosial dan ekonomi. Ayuningtyas, (2014:6) menyatakan jelas bahwa kesehatan adalah hal penting yang berhak di peroleh oleh setiap individu serta menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin agar setiap warga negaranya mau dan mampusu untuk hidup sehat dan memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Fasilitas kesehatan untuk wilayah Kecamatan Pinggir sebagai induk administrasi desa sampai saat ini berdasarkan data dari UPTD (Unit Pelaksana Tugas Dinas) Kesehatan Kecamatan Pinggir, pada tahun 2013 terdapat 1 puskesmas, 5 puskesmas pembantu, 4 praktek dokter, 44 praktek bidan dan 3 poliklinik. Banyaknya tenaga medis di kecamatan Pinggir pada tahun 2013 yaitu sebanyak 17 orang dokter umum, 5 orang dokter gigi dan 79 orang bidan. Klinik Keluarga Berencana yang tercatat di kecamatan Pinggir ada 3 klinik, dengan jumlah peserta aktifnya ada 11.675 peserta dan peserta baru ada 3.816 peserta. Salah satu wilayah yang akan dilakukannya penelitian adalah Desa

Tasik Serai yang merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis yang di pimpin oleh Erwan.S.Sos dengan luas \pm 40.000 hektar dengan pembagian administrasi sistem wilayah 5 Dusun, 9 RW dan 34 RT dengan jumlah penduduk di Desa Tasik Serai sebanyak 6757 orang. Sebagian besar penduduk Desa Tasik Serai bermata pencaharian petani dengan jumlah 1328 orang, nelayan sebanyak 36 orang, perawat 4 orang, guru sebanyak 130 orang guru honorer, PNS sebanyak 13 orang, pedagang sebanyak 46 orang dan buruh karyawan sebanyak 118 orang.

Berdasarkan fasilitas kesehatan yang tersedia dan perekonomian penduduk yang menengah kebawah yang ada di desa Tasik Serai sudah selayaknya masyarakat tersebut memiliki fasilitas kesehatan yakni kartu BPJS Kesehatan, namun yang di temui dilapangan setelah dilakukannya pra observasi masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, padahal dari pernyataan kepala desa Tasik Serai bahwa sosialisasi BPJS Kesehatan ini telah dilaksanakan di desa tersebut. Selain itu saat ditanya mengapa mereka tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan mereka ada yang tersenyum dan ada juga yang mengatakan sulit mengurus itu dan akan menambah biaya lagi, dari pernyataan ini dapat di tangkap bahwa masyarakat tidak memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan dan fasilitas kesehatan yang diberikan pemerintah yang merupakan salah satu program untuk mensejahterakan hidup rakyatnya.

Berdasarkan fenomena permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti **Implementasi Kepesertaan Program BPJS Kesehatan Di Desa Tasik**

Serai Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau melalui fasilitas jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah dan dilaksanakan oleh pihak BPJS Kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kepesertaan BPJS.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah diterangkan dalam latar belakang masalah diatas, agar tidak terjadi kesalahpahaman maka perlu mengidentifikasi masalah terkait dengan judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan agar masyarakat berperan aktif dalam melakukan pendaftaran sebagai peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.
2. Pengaruh atau akibat yang timbul dari masyarakat yang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.
3. Kendala yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan kurang terselenggara di Desa Tasik Serai.
4. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan di Desa Tasik Serai.
5. Pengaruh pengetahuan masyarakat terkait manfaatt JKN-KIS BPJS sehingga tidak mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
6. Adanya persepsi masyarakat akan sulitnya mengurus kelengkapan berkas untuk mendaftar diri sebagai peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.

C. Pembatasan Masalah

Setiawan (2014:20) menjelaskan bahwa pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga dari beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagian saja yang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada masalah :

1. Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan di Desa Tasik Serai.
2. Upaya dan kendala oleh pihak BPJS Kesehatan dalam implementasi kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan di masyarakat Desa Tasik Serai

D. Rumusan Masalah

Sugiyono (2013:55) berpendapat rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan di cari jawabanya melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan di Desa Tasik Serai?
2. Apakah upaya dan kendala pihak BPJS Kesehatan dalam implementasi kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan di masyarakat Desa Tasik Serai?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan di Desa Tasik Serai

2. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan kurang terselenggara di Desa Tasik Serai.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat Desa Tasik Serai
 - a. Sebagai bahan masukan untuk masalah informasi mengenai program layanan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.
 - b. Sebagai bahan masukan untuk masalah faktor yang mempengaruhi sedikitnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kepesertaan layanan BPJS Kesehatan.
2. Untuk peneliti
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai masalah yang diteliti.
 - b. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata-1 di Jurusan Pendidikan dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
3. Untuk kepustakaan
 - a. Sebagai referensi dalam kepenulisan ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kepesertaan program BPJS Kesehatan di Desa Tasik Serai.

- b. Sebagai bahan masukan bagi para penulis maupun literatur perpustakaan yang berkaitan dengan masalah implementasi kepesertaan program BPJS Kesehatan.